



**PROGRAM PEMERINTAH**

## Pemkot Terus Gencarkan Program Perlindungan Anak

JOGJA—Pemerintah Kota (pemkot) Jogja mengencarkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program itu diciptakan agar anak bisa memperoleh hak dasar mereka, salah satunya rasa aman.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkot dengan memberikan pelatihan terhadap calon aktivis program PATBM agar mereka memiliki komitmen kuat untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Terlebih permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak pada zaman sekarang semakin kompleks.

"Keberadaan PATBM sebagai ujung tombak pelindung anak-anak dan masyarakat. Mereka menjadi mitra Pemkot dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah," kata Heroe saat memberikan pengarahan kepada para aktivis PATBM, Senin (5/11). Heroe menegaskan perlindungan

unggul dan berkarakter," kata Heroe.

Kekerasan terhadap anak, menurut Heroe, kini semakin lama semakin beragam bentuknya. Bahkan secara kuantitas terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

"Kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran adalah beberapa contoh kasus yang memerlukan penanganan segera secara komprehensif, simultan, tepat sasaran," kata Heroe.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Jogja Eny Retnowati mengungkapkan penguatan peran keluarga juga dilakukan dengan Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja (Go Sahaja). Gerakan ini salah satunya untuk menekan terjadinya pernikahan dini.

Pasalnya, kasus pernikahan dini di Jogja disebabkan adanya kasus kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD).

Menurut Eny, ada sejumlah faktor munculnya kasus KTD. Selain karena minimnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, hal itu disebabkan longgarnya tata nilai dalam masyarakat. Faktor kemajuan teknologi informasi dan lemahnya penerapan fungsi keluarga juga memicu terjadinya kasus pernikahan dini diakibatkan KTD.

Padaahal, lanjutnya, pernikahan dini sendiri bisa berdampak buruk jika dikaitkan dengan risiko-risiko kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan.

"Misalnya, bisa terjadi komplikasi dalam persalinan, pendarahan, sampai meningkatnya resiko terkena kanker serviks. Pernikahan dini juga membawa resiko sosial dan psikologis dan rentan menimbulkan kasus KDRT, perceraian hingga meningkatnya angka kemiskinan."

(Abdul Hamid Razak)

**DATA KEKERASAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
DI KOTA JOGJA (2013-2017)**

Tahun	Jenis Kelamin			Umur		
	L	P	J	0-17	>18	J
2013	43	648	691	103	588	691
2014	65	577	642	142	500	642
2015	38	588	626	86	540	626
2016	35	508	544	88	456	544
2017	45	209	254	58	196	254

Sumber: Pemkot Jogja (Bard)

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta, .....  
 Plt. Kepala Sekretaris  
 Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005